



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 166/Kep.DPRD-01/2019

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS
KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, BADAN
KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN SIDANG 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, maka perlu untuk menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2019;
- b. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Tahun Sidang 2019 sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat;
2. Berita Acara hasil pemilihan Pimpinan AKD DPRD Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.

- KEDUA : Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2019 sebagaimana Diktum KESATU merupakan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Barat yang bersifat tetap.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bandung
pada tanggal : 4 Januari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

1	2	3	4	5	6
KOMISI II	Bidang Perekonomian : 1. Perdagangan dan Perindustrian; 2. Wilayah Kelautan Daerah; 3. Konservasi Alam; 4. Ketahanan Pangan; 5. Pertanian Tanaman Pangan; 6. Peternakan; 7. Perikanan; 8. Perkebunan; 9. Kehutanan; 10. Logistik; 11. Koperasi dan Pengusaha Kecil, serta; 12. Pariwisata.	1. H. Didi Sukardi, SE 2. Dra. Hj. Ijah Hartini, SH 3. Toto Purwanto Sandi, SE 4. Drs. H.A. Rozaq Muslim, SH.,M.Si 5. DR.Hj.Siti Aisyah Tuti H. S.Sos.,M.Si 6. H. Tien Sutini Bunyamin, S.Sos,M.Ap 7. Ir. H. Herry Dermawan 8. R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira 9. Agus Welianto Santosa, SH 10. H. Drajat Hidayat Soetardja 11. Ir. H. Ridho Budiman Utama 12. Drs. H. Anwar Yasin 13. Hedi Permadi Boy, SE, MM.,M.Ec 14. Dra. Hj. Lina Ruslinawati 15. Hj. Gina Fadlia Swara, SE., MM 16. H. Omin Basyuni, SH 17. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd.,M.Ap 18. Dra. Hj. Tia Fitriani 19. Erni Sugiyanti, S.Ag	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	

1	2	3	4	5	6
KOMISI III	<p>Bidang Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah,Retribusi, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yg dipisahkan, lain-lain PAD yang sah); 2. Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, DAU, DAK, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak & Gas Alam; 3. Pajak Air; 4. Pinjaman Daerah; 5. Perbankan; 6. Dunia Usaha; 7. Otorita; 8. Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD; 9. Penanaman Modal Asing; 10. Penanaman Modal Dalam Negeri; 11. Dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawan Setiawan, SH 2. Drs. H. Hilman Sukiman, S.IP.,M.Si 3. drg. Hj. Is Budi Widuri S, MM 4. Hj. Dede T. Widarsih, SE 5. H. E. Kusnadi, SH 6. Hj. Sumiyati, S.Pd.I 7. Chaerul Rizki P. Mantini 8. Iwan Kustiawan 9. H. Surahman, S.Sos 10. DR. H. Abdul Jabar Majid, MA 11. Drs. Toni Setiawan 12. Asep Wahyu Wijaya, SH 13. Dadang Kurniawan, S.Ip 14. H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd.,M.Si 15. H. Teuku Hanibal, SE 16. H. Pepep Saeful Hidayat, S.Ikom 17. H. Eryani Sulam, M.Si 18. Dr. Hj. Iemas Masithoh M.Noor, SH.,MH 	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa</p>	

1	2	3	4	5	6
KOMISI IV	<p>Bidang Pembangunan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman); 2. Perencanaan dan Pengendalian; 3. Pembangunan Regional; 4. Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional; 5. Perhubungan dan Telekomunikasi; 6. Pertambangan dan Energi; 7. Perumahan Rakyat; 8. Penelitian dan Pengembangan Daerah; 9. Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Ali Hasan, S.IP 2. Drs. H. Daddy Rohanady 3. Nia Purnakania, SH. M.Kn 4. H. Phinnera Wijaya, SE 5. H. Almaida Rosa Putra, SE.,MM 6. Drs. H. Yod Mintaraga, MPA 7. H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd.,H.Hum 8. H. Kusnadi, S.IP 9. Waras Wasisto, SH 10. Drs. Budiyo 11. Ir. H. Gatot Tjahyono, MM 12. Drs. KH. Tetep Abdulatip 13. Ir. H. Imam Budi Hartono 14. Wiwin Winingsih, SE 15. Dr. H. Herlas Juniar, MT 16. H. Ricky Kurniawan, Lc 17. Ir. H. Lucky Lukmasyah Trenggana 18. H. Imran Servia 19. H. Marjaya Ibrahim, SIP 20. H. Ahmad Irfan Alawi 21. H. Oleh Soleh, SH 	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Gerindra Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa</p>	

1	2	3	4	5	6
KOMISI V	Bidang Kesejahteraan Rakyat : 1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Industri Strategis; 3. Ketenagakerjaan termasuk Perlindungan TKI; 4. Pendidikan; 5. Kebudayaan; 6. Pemuda dan Olah Raga; 7. Agama; 8. Sosial; 9. Kesehatan; 10. Keluarga Berencana; 11. Pemberdayaan Perempuan; 12. Transmigrasi, serta; 13. Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar.	1. H. Syamsul Bachri, SH. MBA 2. H. Yomanus Untung, S.Pd 3. Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc 4. Hj. Tati Noviati, S.IP 5. Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM 6. Drs. Maman Abdurrachman 7. Hj. Asyanti Rozana Thalib, SE 8. dr. Ikhwan Fauzi, M. Kes 9. Drs. Bedi Budiman, S.Ip.,M.Si 10. H. Abdul Muiz, Lc 11. H. Sahromi 12. Hj. Yoyoh Rukiyah, S.Ter. Keb 13. H. Ade Anwas 14. Hj. Eni Rif'ati, SE 15. KH. Chumaedi, SH 16. Drs. KH. Habib Syarief Muhamad 17. Edeh L. Puradiredja 18. H. Ali Wardana, SE 19. H. Nasir, S.Ag 20. Hj. Fatimah, SH.,M.Kn	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 166/Kep.DPRD-01/2019

TANGGAL : 04 Januari 2019

TENTANG : SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERDA, BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN SIDANG 2019.

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

ALAT KELENGKAPAN DPRD	TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KET.
1	2	3	4	5	6
Badan Pembentukan Perda Provinsi	<p>Tugas :</p> <p>a. menyusun rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;</p> <p>b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;</p> <p>c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;</p> <p>d. melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. KH. Habib Syarief Muhamad 2. R. Yunandar R. Eka Perwira, ST 3. Drs.H. Daud Achmad, M.AP 4. H. Yomanius Untung, S.Pd 5. Hj. Ganiwati, SH.,MM 6. Hj. Dede T. Widarsih, SE 7. Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM 8. H.M.Hasbullah Rahmad,S.Pd.,M.Hum 9. Iwan Kustiawan 10. Chaerul Rizky P. Mantini 11. Darius Doloksaribu, SH 12. H. Abdul Muiz, Lc 13. Ir. H. Imam Budi Hartono 14. Dr. H. Didin Supriadin, S.Pd.,M.Si 15. Dr. H. Herlas Juniar, MT 16. Wiwin Winingsih, SE 17. Hj. Eni Rif'ati, SH 18. H. Ade Anwas 19. KH. Chumaedi, SH 20. Edeh L. Puradiredja 21. H. Ali Wardana, SE 22. Dr. Hj. Iemas Masithoh M. Noor, SH.,MH 23. Hj. Fatimah, SH.,M.Kn 	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris (Bukan Anggota)</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan</p> <p>Fraksi PDI-Perjuangan</p> <p>-</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi PDI-Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI-Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI-Perjuangan</p> <p>Fraksi Partai Keadilan Sejahtera</p> <p>Fraksi Partai Keadilan Sejahtera</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi Partai Gerindra</p> <p>Fraksi Partai Gerindra</p> <p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan</p> <p>Fraksi Nasdem Hanura</p> <p>Fraksi Nasdem Hanura</p> <p>Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa</p> <p>Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa</p>	

	<p>e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;</p> <p>f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;</p> <p>g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan</p> <p>h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.</p>				
--	--	--	--	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**NOMOR : 166/Kep.DPRD-01/2019****TANGGAL : 04 Januari 2019****TENTANG : SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERDA, BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN SIDANG 2019.****SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

ALAT KELENGKAPAN DPRD	TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KET.
1	2	3	4	5	6
Badan Kehormatan	Tugas : a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD; b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata tertib dan/atau Kode etik DPRD; c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.	1. H. Saipudin Zuhri, SH 2. Mirza Agam Gumay, Sm.HK 3. Hj. Tien S. Bunyamin, S.Sos.,MAP 4. Agus Welianto Santosa, SH 5. KH. DR. H. Abdul Jabar Majid, MA 6. H. Sahromi 7. KH. Chumaedi, SH	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

